



Peran Pendidikan Politik GMPI dalam Peningkatan Kualitas Kader Partai Persatuan Pembangunan Periode 2021-2026

Ilzam Thoriq Robbany^{1*}, Lusi Andriyani²

^{1,2} Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ilzamthoriq17@gmail.com

Abstract. *Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) is a youth organization that functions as a party wing organization and plays a strategic role in providing political education for the cadres of the United Development Party (PPP). Political education is essential to improve cadre quality in terms of ideological knowledge, organizational capacity, and readiness to participate in political activities. This study aims to analyze the role of GMPI in political education, examine the institutional relationship between GMPI and PPP, and identify the challenges and obstacles faced in its implementation. This research employs a qualitative approach using primary and secondary data sources. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted qualitatively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that GMPI actively conducts political education through cadre development programs, guidance activities, and capacity building. The political education implemented by GMPI has a positive impact on improving the quality of PPP cadres, particularly in political understanding, discipline, and participation in party activities. However, GMPI still encounters several constraints, including limited resources, program consistency issues, and internal organizational dynamics. These findings highlight the importance of strengthening the role of youth organizations as sustainable instruments of political education. The implications of this study encourage political parties to enhance youth cadre development synergy in order to produce qualified, competent, and sustainable political cadres.*

Keywords: *Cadre Quality; GMPI; Political Education; United Development Party; Youth Organization.*

Abstrak. *Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) merupakan organisasi kepemudaan yang berperan sebagai organisasi sayap partai serta memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi kader Partai Persatuan Pembangunan. Pendidikan politik tersebut penting untuk meningkatkan kualitas kader dari aspek pengetahuan ideologi kemampuan organisasi serta kesiapan berpartisipasi dalam aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran GMPI dalam pendidikan politik hubungan kelembagaan GMPI dengan PPP serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data reduksi data penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMPI berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik melalui kegiatan kaderisasi pembinaan dan penguatan kapasitas kader. Pendidikan politik yang dilaksanakan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kader PPP terutama pada pemahaman politik sikap kedisiplinan serta partisipasi kader dalam kegiatan partai. Namun demikian GMPI masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya konsistensi program dan dinamika internal organisasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan peran organisasi kepemudaan sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan. Implikasi penelitian ini mendorong partai politik memperkuat sinergi kaderisasi pemuda guna menciptakan kader berkualitas berintegritas berdaya saing dan berkelanjutan secara kelembagaan nasional demokratis inklusif berkarakter.*

Kata kunci: GMPI; Kualitas Kader; Organisasi Kepemudaan; Pendidikan Politik; PPP.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta peran individu dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan politik, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap, nilai, dan orientasi politik warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif dan

bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menegaskan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan kualitas partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi.(Fernando & Sirozi, 2024)

Pada Demokrasi yang ada di Indonesia, pendidikan politik menjadi instrumen strategis untuk membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap dinamika politik nasional yang semakin kompleks. Pendidikan politik dipandang mampu mendorong masyarakat untuk memahami proses politik secara rasional, tidak sekadar bersikap emosional atau pragmatis dalam menentukan pilihan politik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ketahanan Nasional yang menyatakan bahwa kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi dan pendidikan politik masyarakat, khususnya generasi muda.

Generasi muda merupakan kelompok sosial yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan demokrasi karena secara demografis jumlahnya sangat besar dan memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial dan politik. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik generasi muda di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepercayaan terhadap partai politik, apatisme politik, serta minimnya pemahaman terhadap mekanisme politik formal. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi generasi muda menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan kader-kader politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.(Kharisma, 2014)

Pendidikan politik bagi generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi partai politik. Partai politik memiliki peran sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik yang bertugas membentuk orientasi politik anggota dan simpatisannya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, partai politik membentuk organisasi sayap sebagai sarana kaderisasi dan pembinaan politik bagi kelompok tertentu, termasuk pemuda. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik menunjukkan bahwa organisasi sayap partai memiliki peran strategis dalam menjembatani partai politik dengan generasi muda melalui kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi yang berkelanjutan.(Ilham Kurniawan, 2024)

Organisasi sayap partai tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi politik, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran politik yang relatif fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik generasi muda. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, diskusi politik, kaderisasi ideologis, dan kegiatan sosial, organisasi sayap partai mampu memberikan pengalaman politik praktis yang tidak diperoleh di lembaga pendidikan formal. Penelitian lain

yang dimuat dalam Jurnal PPKn menegaskan bahwa keberadaan organisasi sayap partai berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman politik dan loyalitas kader terhadap partai induk.(Pasaribu, 2017)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu partai politik yang telah lama berkiprah dalam sistem politik Indonesia memiliki organisasi sayap pemuda yang dikenal dengan nama Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI). GMPI dibentuk sebagai wadah kaderisasi dan pembinaan generasi muda yang diharapkan mampu menjadi penerus kepemimpinan politik di lingkungan PPP. Dalam konteks persaingan politik yang semakin ketat dan dinamika sistem kepartaian yang terus berubah, peran GMPI menjadi semakin penting sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan kaderisasi partai. Penelitian mengenai organisasi sayap partai menunjukkan bahwa keberhasilan kaderisasi sangat bergantung pada konsistensi program pendidikan politik serta hubungan kelembagaan yang harmonis antara organisasi sayap dan partai induk

Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan politik oleh organisasi sayap partai sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta inkonsistensi program kaderisasi. Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ketahanan Nasional, yang menyatakan bahwa lemahnya manajemen organisasi dan rendahnya komitmen partai induk dapat menghambat efektivitas pendidikan politik yang dijalankan oleh organisasi sayap.(Affandi et al., 2019) Oleh karena itu, kajian mengenai peran organisasi sayap partai dalam pendidikan politik perlu dilakukan secara mendalam untuk memperoleh gambaran empiris yang komprehensif.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku politik warga negara agar mampu berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan politik, tetapi juga diarahkan pada pembentukan orientasi politik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan partisipatif. Dalam kajian pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik dipandang sebagai sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan memperkuat kualitas partisipasi politik masyarakat .(Omara, 2019)

Partai politik memiliki peran strategis sebagai agen pendidikan politik dan kaderisasi dalam sistem demokrasi. Fungsi pendidikan politik partai diarahkan untuk membekali kader dengan pemahaman ideologi, kemampuan organisasi, serta keterampilan politik praktis.

Efektivitas pendidikan politik internal partai sangat menentukan kualitas kader yang dihasilkan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ketahanan Nasional menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pendidikan politik partai berimplikasi pada rendahnya kualitas kader dan meningkatnya praktik politik pragmatis.

Dalam pelaksanaannya, partai politik membentuk organisasi sayap sebagai instrumen kaderisasi dan pendidikan politik bagi kelompok tertentu, termasuk generasi muda. Organisasi sayap partai dipahami sebagai wadah pembinaan politik yang relatif fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik kader muda. Penelitian dalam Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik menegaskan bahwa organisasi sayap partai berperan penting dalam menjembatani partai politik dengan generasi muda melalui kegiatan pendidikan politik dan penguatan kapasitas kader

Kaderisasi politik merupakan proses pembinaan berkelanjutan yang bertujuan mencetak kader partai yang memiliki loyalitas, kapasitas, dan kompetensi politik. Kaderisasi yang efektif tidak hanya menekankan aspek kuantitas keanggotaan, tetapi juga kualitas kader dalam memahami ideologi partai dan menjalankan peran politiknya. Penelitian mengenai organisasi sayap partai menunjukkan bahwa kader yang melalui proses kaderisasi terstruktur cenderung memiliki tingkat partisipasi politik dan komitmen organisasi yang lebih tinggi (Mulia, 2024)

Kualitas kader partai politik merujuk pada kemampuan kader dalam memahami ideologi partai, berdisiplin dalam organisasi, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kualitas kader sangat dipengaruhi oleh intensitas dan sistematika pendidikan politik yang diberikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berkelanjutan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kader, khususnya dalam aspek pemahaman politik dan partisipasi organisasi

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pendidikan politik yang dilakukan oleh Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) dalam meningkatkan kualitas kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), termasuk hubungan kelembagaan GMPI dengan PPP serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, dan dinamika yang terjadi secara alamiah dalam konteks organisasi. (Sugiyono, 2020)

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu pada lingkungan organisasi GMPI yang berkaitan langsung dengan aktivitas pendidikan politik dan kaderisasi PPP pada periode 2021–2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa GMPI merupakan organisasi sayap pemuda PPP yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan kader partai. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pendidikan politik GMPI. Informan dalam penelitian ini meliputi pengurus GMPI, kader GMPI, serta pihak-pihak yang terkait dengan proses kaderisasi dan pembinaan politik di lingkungan PPP.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan untuk menggali informasi mengenai bentuk, pelaksanaan, dan dampak pendidikan politik yang dilakukan oleh GMPI. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pendidikan politik dan kaderisasi yang diselenggarakan GMPI. Data sekunder diperoleh melalui dokumen organisasi, arsip kegiatan, laporan internal, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.(Yusanto, 2020)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara mendalam. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan pendidikan politik GMPI untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan program dan interaksi antaranggota. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta untuk memperkuat keabsahan data penelitian.(Indonesia, 2019)

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penarikan simpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data secara sistematis guna menjawab tujuan penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan

terhadap perkembangan organisasi. Ketua Umum GMPI pertama dijabat oleh Saleh Khalid pada periode 1993–1998, dilanjutkan oleh Ali Taher Parasong pada periode 1998–2003. Pada masa transisi, kepemimpinan GMPI sempat dijalankan oleh Abdurrahman Syagaf sebagai Penjabat Ketua Umum. Selanjutnya, GMPI dipimpin oleh Irgan Chairul Mahfiz sebagai Ketua Umum keempat periode 2003–2010, kemudian oleh Hilman Ismail Metareum pada periode 2010–2021.

Pada Mukhtamar GMPI yang diselenggarakan pada 10 April 2021, Achmad Baidowi terpilih sebagai Ketua Umum dan memimpin GMPI untuk periode 2021–2026. Sebagai organisasi kader yang terstruktur, GMPI memiliki visi, misi, tujuan, serta perangkat organisasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas organisasi. GMPI mengusung tagline “Sanggup Mengatasi Tantangan”, yang merefleksikan semangat juang, ketangguhan, serta kesiapan kader GMPI dalam merespons berbagai tantangan sosial, politik, ekonomi, dan kebangsaan. Tagline tersebut tidak hanya berfungsi sebagai slogan organisasi, tetapi juga sebagai nilai motivasional yang ditanamkan dalam proses kaderisasi dan pembinaan anggota. Identitas dan jati diri organisasi GMPI tercermin secara simbolik dalam lambang organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GMPI Bab V tentang Atribut Organisasi Pasal 37.



Gambar 2. Lambang GMPI.

Lambang GMPI berbentuk perisai persegi lima yang melambangkan ketangguhan dan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar organisasi. Kombinasi warna merah dan putih pada latar belakang perisai merepresentasikan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas yang berada di tengah perisai melambangkan nilai Ketuhanan, cita-cita luhur, serta harapan akan masa depan bangsa yang gemilang. Dua tangan berwarna hijau yang menyangga bintang mencerminkan peran generasi muda sebagai penggerak pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Tulisan GMPI di bagian bawah perisai menegaskan identitas organisasi sebagai organisasi kader pemuda. Tujuan utama GMPI adalah membina dan mengembangkan generasi muda Indonesia agar menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT,

memiliki semangat persatuan dan kesatuan, berwawasan kebangsaan, berjiwa mandiri, serta memiliki tanggung jawab sosial dan politik dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridai Allah SWT. Tujuan tersebut menjadi landasan normatif sekaligus arah strategis seluruh program dan kegiatan GMPI.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, GMPI melaksanakan berbagai usaha yang terencana dan berkelanjutan. Usaha-usaha tersebut meliputi pembinaan kepribadian generasi muda agar memiliki integritas moral dan spiritual, pengembangan kader pembangunan yang tangguh, terampil, dan mandiri, serta peningkatan profesionalisme anggota sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selain itu, GMPI juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik generasi muda melalui proses kaderisasi politik yang sistematis dan terarah. Dalam konteks demokrasi, GMPI turut berkontribusi dalam upaya penguatan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta menjalankan berbagai program lain yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Pada periode kepengurusan 2021–2026, GMPI memiliki susunan pengurus pusat yang bertugas mengelola, mengoordinasikan, dan menjalankan roda organisasi secara kolektif dan profesional. Struktur kepengurusan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program kerja, konsolidasi organisasi, serta keberlanjutan peran GMPI sebagai organisasi sayap pemuda PPP dalam dinamika politik dan pembangunan nasional.

Sistem Pendidikan Politik GMPI terhadap Generasi Muda

Sistem pendidikan politik yang dijalankan oleh Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) terhadap generasi muda merupakan bagian dari fungsi kaderisasi organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pendidikan politik dipahami sebagai proses pembinaan yang bertujuan membentuk pemahaman politik, sikap organisasi, serta kesiapan kader dalam berpartisipasi pada aktivitas politik dan kepartaian. GMPI memandang pendidikan politik tidak hanya sebagai kegiatan transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter politik kader yang berlangsung secara berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, pendidikan politik GMPI dijalankan melalui pola yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur. Pendidikan politik yang bersifat terstruktur diwujudkan melalui kegiatan resmi organisasi seperti kaderisasi, pelatihan, pembekalan, dan forum-forum internal GMPI. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai ideologi partai, visi dan misi PPP, sistem politik nasional, serta peran dan tanggung jawab kader dalam organisasi. Pendidikan politik terstruktur ini biasanya dilaksanakan secara berjenjang dan melibatkan pengurus serta kader yang dianggap memiliki pengalaman dan kapasitas dalam bidang politik dan organisasi.

Selain melalui kegiatan terstruktur, pendidikan politik GMPI juga berlangsung secara tidak terstruktur melalui interaksi sehari-hari dalam kehidupan organisasi. Pendidikan politik ini terjadi melalui diskusi informal, komunikasi antaranggota, serta keterlibatan langsung kader dalam berbagai kegiatan organisasi dan partai. Melalui proses ini, kader memperoleh pemahaman politik dari pengalaman langsung, baik melalui pengamatan terhadap dinamika organisasi maupun melalui pertukaran pandangan dengan pengurus dan kader senior. Pendidikan politik yang berlangsung secara tidak terstruktur memungkinkan kader memahami realitas politik secara lebih kontekstual dan praktis.

Kedua bentuk pendidikan politik tersebut saling melengkapi dalam membentuk pemahaman dan sikap politik kader GMPI. Pendidikan politik terstruktur memberikan dasar pengetahuan dan arah ideologis, sementara pendidikan politik tidak terstruktur memperkuat pemahaman melalui pengalaman dan praktik organisasi. Melalui sistem pendidikan politik ini, GMPI berupaya membangun kader muda yang memiliki pengetahuan politik, kedisiplinan organisasi, serta loyalitas terhadap partai. Proses pendidikan politik yang dijalankan juga menjadi sarana pembentukan solidaritas organisasi dan penguatan identitas kader sebagai bagian dari PPP, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada dinamika organisasi dan keterbatasan pelaksanaan program.

Pendidikan politik merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik, generasi muda dapat memahami sistem politik, nilai-nilai demokrasi, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bagi partai politik, pendidikan politik menjadi sarana strategis untuk membentuk kader yang memiliki pemahaman ideologi, kemampuan kepemimpinan, serta kesiapan berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan nasional. (Rahman et al., 2022)

Pendidikan politik juga diperlukan untuk menjawab persoalan rendahnya partisipasi politik dan sikap apatis generasi muda terhadap politik. Pendidikan politik partai bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan politik kader maupun masyarakat. Dengan demikian, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat perjuangan politik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan demokrasi.

Pendidikan politik merupakan upaya mencerdaskan kehidupan politik rakyat serta meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesadaran politik pemuda, memperkuat pemahaman ideologi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta membekali generasi muda

dengan wawasan kebangsaan, demokrasi, dan perkembangan politik nasional. Pendidikan politik juga diharapkan mampu membentuk sikap dan kedewasaan berpolitik dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Secara umum, pendidikan politik dapat dibedakan menjadi pendidikan politik formal dan pendidikan politik informal.

Relasi Politik GMPI dengan PPP

Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki hubungan historis dan ideologis yang erat. GMPI merupakan organisasi kepemudaan Islam yang bergerak pada pembinaan kesadaran politik, sosial, dan keagamaan generasi muda, sementara PPP adalah partai politik Islam yang lahir dari fusi beberapa partai Islam pada masa Orde Baru. Meskipun bergerak pada bidang yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan visi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Dwiki Irnanda & Fuady, 2020)

Sejak awal berdirinya, GMPI diposisikan sebagai mitra strategis PPP, khususnya dalam penguatan basis pemuda. Kesamaan orientasi ideologis menjadikan GMPI sebagai salah satu wadah pengkaderan yang mendukung keberlangsungan PPP, baik melalui pembinaan sumber daya manusia maupun penguatan dukungan politik di masyarakat. Pada masa Orde Baru, GMPI turut berperan dalam mendukung perjuangan politik PPP, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Sebagai organisasi sayap partai, GMPI memiliki fungsi untuk membantu memperluas jangkauan dan pengaruh PPP di tengah masyarakat. Secara keilmuan, organisasi sayap partai berperan sebagai penghubung antara partai politik dan kelompok pemilih tertentu, seperti pemuda, serta membantu menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada partai. Selain itu, organisasi sayap juga menjalankan program-program yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh struktur inti partai.

Pada masa Reformasi, hubungan GMPI dan PPP semakin terlihat melalui proses kaderisasi. Sejumlah kader GMPI terlibat aktif dalam struktur PPP, baik sebagai pengurus partai maupun sebagai calon legislatif di berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa GMPI berfungsi sebagai ruang pembibitan kader politik yang berkelanjutan bagi PPP. Peran GMPI dalam mendukung PPP meliputi pengkaderan politik, mobilisasi dukungan, serta advokasi isu-isu keumatan. Melalui proses kaderisasi, GMPI membentuk pemuda yang memiliki pemahaman keislaman dan kemampuan politik. Jaringan GMPI juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan politik PPP, terutama pada masa kampanye. Selain itu, GMPI dan PPP kerap bekerja sama dalam memperjuangkan isu-isu seperti pendidikan Islam dan kebijakan sosial.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMPI, hubungan dengan PPP ditegaskan sebagai hubungan historis, aspiratif, dan programatik. GMPI menyalurkan aspirasi politiknya melalui PPP, namun tetap menjalankan perannya sebagai organisasi kepemudaan yang fokus pada pembinaan kader. Meskipun memiliki kedekatan dengan PPP, GMPI tetap dituntut menjaga keseimbangan peran agar tidak kehilangan identitasnya sebagai organisasi pemuda.

Independensi organisasi penting untuk memastikan GMPI tetap menjadi wadah pembinaan generasi muda Islam yang inklusif, sekaligus berkontribusi bagi keberlanjutan PPP sebagai partai politik Islam. Secara keseluruhan, relasi GMPI dan PPP bersifat strategis dan saling menguntungkan. GMPI berperan sebagai penyedia kader dan penguat basis pemuda, sementara PPP memberikan ruang politik bagi kader GMPI untuk berkiprah lebih luas. Hubungan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga eksistensi dan regenerasi politik Islam di Indonesia.

Strategi GMPI dalam Menghadapi Hambatan dan Tantangan

Dalam menjalankan peran pendidikan politik dan kaderisasi, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal organisasi. Hambatan internal yang sering dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan organisasi, serta konsistensi partisipasi kader dalam mengikuti kegiatan. Sementara itu, tantangan eksternal berkaitan dengan dinamika politik partai, persepsi generasi muda terhadap politik, serta perubahan sosial yang memengaruhi minat dan keterlibatan pemuda dalam organisasi politik. Menghadapi kondisi tersebut, GMPI menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan program dan efektivitas pendidikan politik. (Wicaksana, 2018)

Salah satu strategi yang dilakukan GMPI adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi. Konsolidasi dilakukan melalui komunikasi yang intensif antar pengurus dan anggota guna menyamakan persepsi terkait tujuan dan arah organisasi. Melalui konsolidasi ini, GMPI berupaya membangun solidaritas organisasi serta meningkatkan rasa memiliki kader terhadap organisasi. Konsolidasi internal juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan politik agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kader di lapangan.

GMPI juga menerapkan strategi fleksibilitas program dalam pelaksanaan pendidikan politik. Keterbatasan sumber daya mendorong GMPI untuk menyesuaikan bentuk dan skala kegiatan, tanpa menghilangkan substansi pendidikan politik itu sendiri. Pendidikan politik tidak selalu dilaksanakan melalui kegiatan besar dan formal, tetapi juga melalui forum diskusi

kecil, pertemuan rutin, dan aktivitas informal yang lebih mudah diakses oleh kader. Pendekatan ini memungkinkan GMPI tetap menjalankan fungsi pendidikan politik meskipun dengan keterbatasan sarana dan anggaran.

Selain itu, GMPI berupaya memaksimalkan jaringan dan relasi dengan PPP serta pihak-pihak terkait untuk memperoleh dukungan organisasi. Kedekatan struktural dengan PPP dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi program kaderisasi dan memperoleh akses terhadap sumber daya yang dimiliki partai. GMPI juga mendorong kader untuk aktif terlibat dalam kegiatan partai sebagai bentuk pembelajaran politik langsung dan penguatan kapasitas kader.

Strategi lain yang dilakukan GMPI adalah mendorong peningkatan partisipasi kader melalui pendekatan persuasif dan keteladanan pengurus. Pengurus organisasi berperan sebagai contoh dalam kedisiplinan, komitmen, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan organisasi. Dengan pendekatan ini, GMPI berupaya membangun budaya organisasi yang positif dan mendorong kader untuk tetap aktif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda di lingkungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pendidikan politik yang dijalankan GMPI dilaksanakan melalui sistem yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur, yang saling melengkapi dalam membentuk pemahaman politik, sikap organisasi, serta kesiapan kader dalam berpartisipasi pada aktivitas kepartaian. Melalui kegiatan kaderisasi, pembinaan, dan interaksi organisasi, GMPI berupaya membekali kader dengan pengetahuan politik, kedisiplinan, dan loyalitas terhadap partai.

Relasi politik antara GMPI dan PPP terjalin secara struktural dan fungsional, di mana GMPI berperan sebagai organisasi sayap pemuda yang menjalankan fungsi kaderisasi dan mobilisasi politik partai. Hubungan ini memberikan GMPI legitimasi dan dukungan dalam menjalankan program pendidikan politik, sekaligus menjadi sarana bagi kader muda untuk memperoleh pengalaman politik secara langsung. Namun, relasi tersebut juga diwarnai oleh dinamika organisasi yang memengaruhi ruang gerak GMPI dalam menentukan agenda secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya, GMPI menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersumber dari internal organisasi seperti keterbatasan sumber daya dan partisipasi kader,

maupun dari faktor eksternal seperti dinamika politik dan rendahnya minat generasi muda terhadap politik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, GMPI menerapkan strategi konsolidasi internal, fleksibilitas program, pemanfaatan jaringan dengan PPP, serta pendekatan persuasif dalam meningkatkan partisipasi kader. Strategi-strategi tersebut memungkinkan GMPI tetap menjalankan fungsi pendidikan politik meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, F. N., Sulistyaningsih, T., & Hijri, Y. S. (2019). Pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Dwiki Irnanda, J., & Fuady, M. E. (2020). Strategi komunikasi politik Partai Persatuan Pembangunan. *Prosiding Hubungan Masyarakat*, 6(1).
- Fernando, D. A., & Sirozi, M. (2024). Pengertian “politik pendidikan” dan perbedaannya dengan “pendidikan politik” dan “politisasi pendidikan.” *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.2314>
- Hannan, A., & Abdillah, K. (2016). Menakar peran dan fungsi organisasi sayap partai politik (OSP) dan pengaruhnya terhadap dinamika politik kontemporer. *Educação e Sociedade*, 1(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Memahami metode penelitian kualitatif* (DJKN No. 2).
- Kharisma, D. (2014). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *E-Journal Unsrat*, 1(7).
- Kurniawan, S. I. (2024). Pentingnya pendidikan politik dalam Pilkada 2024. *UMJ.ac.id*, 4.
- Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan politik dan manfaat peranannya di masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(6). <https://doi.org/10.58344/locus.v3i6.2867>
- Omara, A. (2019). Eksistensi organisasi sayap partai politik dalam sistem politik di Indonesia. Dalam *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*.

- Pasaribu, P. (2017). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Rahman, A., Najamuddin, & Khalyubi, W. (2022). Kontestasi Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan umum tahun 2019. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i2.1658>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1). <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Wicaksana, A. (2018). *Strategi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu legislatif* [Skripsi/Repository]. Repository Raden Fatah.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of Scientific Communication (JSC)*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>